BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Praktek kerja ini dilakukan sejak tanggal 05 Juli sampai 06 Agustus 2010 yang bertenpat di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jl.Diponegoro No. 22 Bandung. Di dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Praktek kerja ini dilakukan sesuai dengan pokok bahasan yang ingin diketahui dan diteliti penulis yaitu mengenai tinjauan perbandinagn anggaran dan realisasi belanja terhadap kinerja pemerintah.Pada Pemerintah Provinsi Jawea Barat.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan

3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik kuliah kerja praktek ini dilaksanakan dalam satu periode selama satu bulan yaitu 25 hari kerja yang berlangsung mulai tanggal 05 Juli 2010 sampai 04 Agustus 2010.Selama melaksanakan kerja praktek pada Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulis ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) dimana bagian ini mempunyai fungsi dan peran sama pentingnya dengan bagian lain:

1. Membantu mengentry lapotan realisasi anggaran
2. Mengambil data-data yang diperlukan dalam pembahasan Kerja Praktek
3. Diskusi atau Tanya jawab dengan pegawai AKLAP,di bidang pelaporan anggaran
4. Mendengarkan arahan dari Ibu dan Bapak pembimbing di AKLAP.

Namun dalam hal ini penulis tetap dibimbing dan diarahkan agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan koreksi pada masa yang akan datang.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Di dalam pembahasan yang akan penulis jabarkan, penulis akan menjabarkan pula apa yang dimaksud anggaran, belanja, realisasi dan kinerja

Pengertian anggaran menurut Munandar dalam bukunya *Budgeting* , perencanaan kerja, pengawasan kerja (2000,1) adalah

> "**Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktuperiode tertentu yang akan datang"**

Pengertian belanja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

> "**Belanja adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang diharapkan mempunyai nilai yang seimbang."**

Pengertian realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

> **"Realisasi adalah menjadi nyata, perwujudan pernyataan nyata (mengusahakan melaksanakan perwujudan"**

Dari definisi diatas dapat disimpulakan bahwa perbandingan anggaran dan realisasi belanja adalah urutan dalam membuat laporan dari pelaksanaan realisasi yang digunakan untuk menjalankan kegiiatan pemerintahan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter selam periode tertentu.

3.3.1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran

A. Anggaran

1. Unsur-Unsur Dalam Anggaran

Dalam suatu anggaran yang disusun oleh organisasi baik itu organisasi swasta ataupun pemerintahan haruslah mencakup beberapa unsure yang biasanya terkandung dalam suatu anggaran. Unsur-unsur tersebut harus terkandung dalam suatu anggaran dikarenakan unsure-unsur tersebut menggambarkan rencana kegiatan perusahaan

yang akan dilakukan dalam periode yang akan dating. Menurut Munandar (2001:3), suatu anggaran mempunyai empat unsu yaitu :

1. *Rencana,* ialah suatu penetuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran juga merupakan suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan dating. Hanya saja anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter.
2. *Meliputi seluruh kegiatan perusahaan*, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Mengingat bahwa anggaran adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, maka sudah semestinya bahwa anggaran harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan.
3. *Dinyatakan dalam unit moneter*, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit “Rupiah”. Unit moneter ini sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda-beda, seperti kilogram, meter, meer persegi, liter dan sebagainya. Dengan unit moneter dapatlah diseragamhakan semua kesatuan yang berbeda tersebut,

sehingga memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta dianalisa lebih lanjut.

4. *Jangka waktu tertentu yang akan dating*, yang menunjukan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat didalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

2 Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sector public seperti lembaga pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana public yang dibebankan kepadanya. Anggaran dalam akuntansi sector public memiliki beberapa fungsi, menurut Nordiawan (2007:20) fungsi anggaran antara lain adalah :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

   Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

   Dengan adanya anggaran, organisasi nsektor public dapat menghidari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sector public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

4. Anggaran sebagai alat politik

   Dalam organisasi sector public, komitmen pengelola dalam melaksanakan progam-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

   Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

   Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhnya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

   Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat " menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai " (*challenging but attainable atau demanding but achievable*). Maksudnya adalah suatu anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

B. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntanbilitas sebagai mana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingakat ketercapaian target-target yang tealah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Laopran Realisasi Anggaran

Laporan realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut :

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
2. Cakupan entitas pelaporan
3. Periose yang dicakup
4. Mata uang pelaporan, dan
5. Satuan angka yang diugunakan

D. Isi Laporan Realisasi Anggran

Laporan realisasi anggran disajikan sedemikian rupa sehingga menciptakan unsur pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit, dan pembiayaan yang dilakukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisai pendapatan, , belanja, transfer, surflus/deficit, dan pembiayaan dengan anggaranya. Laporan realisasi anggran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laoran keuangan yang memuat hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggarn seperti kebijakn fiscal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan

Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan,
2. Belanja,
3. Transfer,
4. Surflus atau deficit,
5. Penerimaan pembiayaan,
6. Pebgeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto, dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA

Contoh Format Laporan Realisai Anggran Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI

LAOPRAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISAI 20X0
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak derah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan HasilKekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	**Jumlah Pendapatan asli Daerah**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PENGENBANGAN**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khuisus	xxx	xxx	xx	xxx
15	**Jumlah Pendapatan Dana Pengenbangan**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18s/d19)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
21	**Total Pendapatan transfer (15 + 20)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
22					
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	**Jumlah Pendapatan Lainnya yang sah (24 s/d 26)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
28	**JUMLAH PENDAPATAN (7+21+27)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
29	**BELANJA**				
30	**BELANJA OPERASI**				

31	Belanja pegawai	xzx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan sesia	xxx	xxx	xx	xxx
37	**Jumlah Belanja Operasi (31s/d36)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
38					
39	**BELANJA MODAL**	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	**Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
47					
48	**BELANJA TAK TERDUGA**				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
51	**Jmlah Belanja (37 + 46 + 50)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
52					
53	**TRANSFER**				
54	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KEKABUPATEN /KOTA**				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil retribusi ke Kabupaten,Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnyua ke Kabupaten/kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
59	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER(51 + 58)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
60					
61	**SURFLUS/DEFISIT (28 - 59)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**XXX**
62					
63	**PEMBIAYAAN**				
64					
65	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
66	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

71	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	**jumlah Penerimaan (66 s/d 77)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
79					
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	**Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
93	**PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)**	**XXX**	**XXX**	**XX**	**xxx**
94					
95	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (61 + 93)**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

Gambar 3.1

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

3.3.2 Perbandingan Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

1. Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode.

Dalam laporan realisasi anggran pemerintah provinsi Jawa Barat, ter dapat 4 unsur pendapatan, yaitu Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, transfer pemerintah pusat lainnya, dan lain-lain pendapatan yang sah :

A. Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimama diatur dalam pasal 79 Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah. Sumber Pendapatan Asli daerah terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Dalam Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 pemerintah menganggarkan untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp.

5.099.622.444.134,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.520.690.390.00 dengan persentase sebesar 108.26%. ini menunjukan kenaikan jumlah pendapatan sebesar Rp. 421.372.246.256

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi yang berasal dari berbagai pihak, misalnya dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima beberapa dana transfer dari Pemerintah Pusat diantaranya : Dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana Alokasi umum dan Dana Alokasi khusus. Dari ke empat pendapatan transfer diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan sebesar Rp. 1.958.446.598.046 sedangkan realisasi dari pendapatan transfer adalah Rp. 2.197.375.994.553 dengan jumlah kenaikan sebesar Rp. 238.929.396.507 dan persentase 112.208%

Dari hasil pendapatan di atas dapat dijumlahkan antara pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer, transfer Pemarintah Pusat lainnya, serta lain-lain Pendapatan yang sah , dari segi anggaran, apabila dijumlahkan sebesar Rp. 7.091.000.804.180 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 7.787.181.567.577 dengan kenaikan pendapatan sebesar Rp. 696.180.763.397 dan persentase 109.82%. Ini menunjukan kimerja Pemerintan Provinsi Jawa Barat yang sangat baik dan melakukan penganbdiannya kepada masyarakat

2. Belanja

Belanja adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang diharapkan mempunyai nilai yang seimbang. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kegiatan belanja, yaitu :

A, Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi Belanla Pegawai, belanja barang, belanja bunga , belanja subsisi, belanja hibah dan belanja bantuan social .Untuk tahun 2009 Provinsi Jawa Barat menganggarkan untuk Belanja operasi sebesar Rp. 6.150.468.282.693.75 dengan realisasi sebesar Rp. 5.391.284.459.167 yang berarti terdapat penurunan jumlah penghematan belanja sebesar Rp. 759.183.823.526.75 Hasil tersebut didapat dari beberapa jenis belanja diatas.

B Berlanja Modal

Belanja Modal adalah Pengeluaran Anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pemerintah Provinsi jawa Barat pada tahun 2009 menganggarkan Rp

1.063.311.992.617,25 untuk belanja modal, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 726.481.161.889 dan itu berate menurunya jumlah belanja modal pada tahun 2009 sebesar Rp. 336.830.830.728.25 dengan persentase 68.32%

C Belanja Tak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.Untuk Tahun 2009 provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp. 39.786.390.313 dengan realisasi sebesar Rp. 1.650.000 sehingga berkurang menjadi Rp. 39.784.740.313 dengan persentase 0.60%

D Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporam ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer untuk tahun 2009, meliputi bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dan Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota anggaran untuk kedua transfer tersebut sebesar Rp. 2.029.916.837.850 sedanngkan realisasi sebesar Rp. 2.075.846.644.957 itu berati meningkatnya jumlah transfer dari anggaran sebesar Rp. 45.929.807.107 dengan persentase 102.26%

Dengan demikian total dari seluruh belanja Pemerintah privinsi Jawa Barat pada tahun 2009 adalah , untuk anggaran sebesar Rp. 9.283.483.50.474 sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.193.613.916.013 dengan pengurangan Rp. 1.089.869.587.461 dan persentase 88.26%

3. SURFLUS/DEFISIT

Surflus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surflus/deficit

Untuk tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami Surflus sebesar , untuk anggaran Rp. 2.192.482.699.294 sedangkan reralisasinya sebesar Rp. 406.432.348.436 jumlah itu diperoleh dari hasil pengurangan antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja.

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surflus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dari divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umun Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

Dalam laporam Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009, penerimaan pembiayaan hanya berasal dari Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) . Pemerintah menganggarkan sebesar Rp, 2.457.196.766.549 dengan realisasi yang sama yaitu sebesar Rp. 2.457.196.766.549 ini menunjukkan tidak adanya penambahan maupun pengurangan baik dari sisi anggaran maupun realisasi dengan persentase sebesar 100%

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umun Negara/Daerah antar lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

Dalam laporam Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009, penerimaan pembiayaan hanya berasal dari Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah dan Pembayaran pokok Utang dengan masing-masing angka sebesar: untuk Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp. 264.546.160.000 dengan realisasi sebesar Rp. 230.626.160.000 ini memunjukan pengurangan sebesar Rp. 33.920.000.000 dengan persentase sebesar 87,10%. Kemudian yang kedua berasal dari Pembayaran pokok Utang dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 167.907.255 dan Rp. 78.147.895 ini menunjukan berkurangnya pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 89.759.360 dengan persentase 46,54%

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Pembiayaan neto dalan laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 dihitung dari pengurangan penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembiayaan.. Untuk anggarannya sebesar Rp, 2.1292.482.699.294 dan realisasi sebesar Rp. 2.226.492.458.654 ini memunjukkan bertambahnya dari sisi realisasi sebesar Rp. 3.009.759.360 dengan persentase 101,55%

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisai penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tertentu. Untuk anggarannya

dihitung dari penjumlahan antar defisit dengan pembiayaan neto yaitu sebsear (Rp, 2.192.482.699.294) ditambah Rp. 2.192.482.699.294 yang apabila dijumlahkan sama dengan Rp. 0.00 ini dari sisi anggarannya, sedangkan untuk realisasinya adalah sebesar (Rp.406.432.348.436) ditambah Rp. 2.226.492.458.654 dengan jumlah sebesar Rp, 1.820.060.110.218

Angka Rp. 1.820.060.110.218 ini menunjukan sisa lebih pembiayaan anggran (SILPA). Hal ini berari pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menganggarkan dan sisanya sama dengan Rp. 0.00 namun setelah terjadi realisasi sisa lebih pembiayaan anggaranya sebesar Rp 1.820.060.110.218 ini menunjukkan sisa uang/dana unuk tahun 2009 sebesar tersebut